

PERAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN DESENTRALISASI PEMBANGUNAN

*(Studi Empiris tentang Peran Penerimaan Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Pajak terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Pembangunan
di Kabupaten Gresik)*

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ACHMAD ROYYAN RIFKI

NIM. 079936157

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

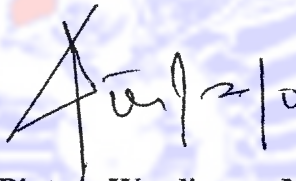
Semester Genap Tahun 2002-2003

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 9 Juni 2003

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan
dan disetujui untuk Diuji
mengetahui

Dosen Pembimbing



Drs. Bintoro Wardiyanto M.Si

NIP 131 801 405

Abstraksi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan legitimasi hukum kepada Daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kriteria yang penting untuk mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan, dengan kata lain keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, hasil pengolahan yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Bagian Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu, dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus, dan Bagian Lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana peran penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan desentralisasi pembangunan yang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten Gresik ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak sebagai sumber keuangan daerah bagi pelaksanaan desentralisasi pembangunan ?

Metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanasi menjadi pilihan peneliti untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi. Lokasi Penelitian di Kabupaten Gresik. Teknik penentuan informan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, teknik observasi dan teknik dokumenter. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipilih Triangulasi data dengan teknik analisa data kualitatif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak telah memberikan peran yang signifikan terhadap pelaksanaan desentralisasi pembangunan.

1. Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak daerah yang sangat potensial dengan memberikan kontribusi pada pajak daerah rata-rata per tahun sebesar 88,4 %
2. Pajak daerah merupakan elemen Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dengan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 53,65 % dan 9,21 % pada Pendapatan Total Kabupaten Gresik

3. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap belanja pembangunan rata-rata per tahunnya sebesar 39,6 %
4. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis Bagi Hasil Pajak yang sangat potensial dengan memberikan kontribusi pada Bagi Hasil Pajak rata-rata per tahunnya sebesar 61,8 %.
5. Pada Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum masih lebih potensial dibanding dengan Bagi Hasil Pajak. Bagi Hasil Pajak memberikan kontribusi pada Dana Perimbangan rata-rata per tahunnya sebesar 19,61 %
6. Bagi hasil pajak memberikan kontribusi pada Pendapatan Total Kabupaten Gresik rata-rata per tahunnya sebesar 14.9 %
7. Bagi Hasil Pajak memberikan kontribusi terhadap Belanja Pembangunan rata-rata per tahunnya sebesar 64 %

Hambatan-hambatan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Faktor-faktor menghambat upaya pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak sebagai sumber keuangan daerah bagi pelaksanaan desentralisasi pembangunan antara lain :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah dan bagi hasil pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengertian dan pemahaman akan pentingnya pajak
2. Adanya Pembekuan atau pencabutan oleh pemerintah pusat
3. Hasil pungutan lebih kecil dari biaya pungutan
4. Keterbatasan personal dan sarana transportasi
5. Keterbatasan data dan informasi